

## ABSTRAK

Latifah Husna, 2011,( Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Kekuatan Imperatif Mediasi). Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Ibu Erfaniah Zuhriah, M.HI  
Kata kunci: Hakim, Mediasi, Imperatif

---

Peraturan Mahkamah Agung dibuat secara rinci dengan tujuan agar proses mediasi yang dibantu oleh mediator dapat berjalan dengan lancar dan menuai keberhasilan, dengan pasal-pasal pengaturan yang terperinci akan memberikan beban kepada para pihak. Hal tersebut merupakan salah satu efek jika sebuah aturan diatur dengan rigid dan detail. Salah satu ketentuan menarik dari PERMA No. 1 tahun 2008 adalah Pasal 2 ayat 3, yang menyatakan bahwa:

*“Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.*

Dari Pasal tersebut maka timbulah kegelisahan akademik tentang kekuatan imperatif mediasi itu sendiri yang menyebutkan putusan batal demi hukum jika tidak melakukan mediasi kemudian bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan imperatif mediasi dan bagaimana kekuatan hukum PERMA menurut Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Undang-undang.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris atau penelitian Hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan juga dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kekuatan yang imperatif karena memang harus dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, hanya saja para hakim kurang setuju dengan adanya pernyataan pada isi pasal 2 ayat 3 yang menyatakan putusan batal demi hukum. Dan kekuatan hukum dari PERMA ini adalah mengikat muthlak mengingat di naungi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam kewenangannya mengeluarkan peraturan yang bersifat diakui dan mengikat sesuai Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasannya.